

**ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Pada Sentra UKM)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
Program Studi Manajemen*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NURMI SYAHFITRI RITONGA
NPM. 1505161207

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2018**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : **NURMI SYAHFITRI RITONGA**
NIM : **1505161207**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA SENTRA UKM)**

Diyatakan : **(B/A) Eulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Pengaji

Penguji I

Penguji II

(NELARIANTY, SE, M.M)

(Drs. DANISKANDAR, SE, M.M)

Pembimbing

(SRI FITRI WAHYUNE, SE, M.M)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : NURMI SYAH FITRI RITONGA
NPM : 15051601207
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS SENTRA UMK)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SRI FITRI WAHYUNI, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

JASMAN SARIFUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si


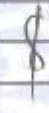
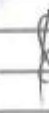
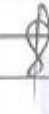
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURMI SYAHFITRI RITONGA
N.P.M : 1505161207
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS SENTRA UMK)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/2-2019	Pembahasan - penambahan teori - penambahan jurnal		
25/2-2019	Kesimpulan disesuaikan dengan pembahasan - perbaikan tulisan.		
28/2-2019	- Perbaiki saran - saran disesuaikan dengan rumusan masalah		
7/3-2019	- Pembahasan disesuaikan dengan teori		
11/3-2019	Acc Skripsi		

Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Manajemen

Pembimbing Skripsi


SRI FITRI WAHYUNI, SE, MM


JASMAN SYARIFUDDIN, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NURMI SYAHMELI RHOUGA
NPM : 1505161207
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/IESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 24 JAN 2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Nurmi Syahfitri Ritonga, NPM 1505161207, Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Sentra UKM)

Penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis Good Corporate Governace (GCG) Pada UKM Mart, dengan menggunakan Prinsip- prinsip Good Corporate Governace (GCG) . Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan objek penelitian adalah metode wawancara di UKM Mart. Dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti berupa tanya jawab tentang prinsip- prinsip Good Corporate Governace yang dilakukan UKM Mart.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governace (GCG) pada UKM Mart sudah di teraokan dengan baik, dan mengalami perubahan pada perusahaan semakin baik manajemennya. Hal ini dapat di ukur dengan pelaksanaan Prinsip- Prinsip Good Corporate Governace (GCG) yaitu Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas), Indepedency (Kemandirian), Fairness (Kewajaran) mengalami perubahan yang sangat baik setelah di terapkan pada UKM Mart.

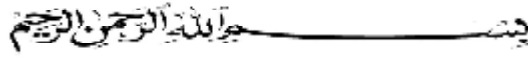
Penerapan GCG dilakukan dengan 3 langkah yaitu : 1. Persiapan

2. Impelementasi

3. Evaluasi

Kata Kunci : Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas), Indepedency (Kemandirian), Fairness (Kewajaran).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala berkat dan karunia-nya. Akhirnya atas segala bantuan serta memotivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada ALLAH SWT dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, berharap skripsi ini dapat lebih sempurna. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA USAHA KECIL (STUDI KASUS UKM SENTRA) ”. Shalawat dan salam tak luput penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, manusia dengan segalaketeladanan yang ada padanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia_Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Proposal ini.

2. Teristimewa terima kasih untuk Ayahanda Kasiono Ritonga dan Ibunda Nurbaiti Nst tercinta yang telah mengasuh dan memberi rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan yang tidak terlewatkan Abangnda Nurman Syahputra Ritonga , Serta Adik saya tercinta Nurrani Syah Putri Ritonga. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moral, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada hentinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E.,M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jasman Syarifudin Hasibuan, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak DR. Jufrizen, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Sri Fitri Wahyuni SE, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam meyelesaikan Skripsi.

10. Bapak M. Basri Kamal S.E M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas J Manajemen Siang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
13. Penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi, Teristimewa kepada Abangnda Indra Narosa Siregar yang selalu siap sedia meringankan langkah untuk membantu, menghibur dan memberi semangat dengan canda tawa dan kebersamaan, Serta rekan seperjuangan saya Nuriyanti, Rahma, Yuni, Riska, Putri, Ayu, dan Dwi yang sedang sama-sama berjuang untuk menyanggah Gelar Sarjana terimakasih atas kerjasama atas motivasi selama ini, semoga ALLAH selalu meridhoi dan memberkahi perjuangan selama ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya atas segala bantuan serta memotivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini,penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada ALLAH SWT dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, berharap skripsi ini dapat lebih sempurna. Amin YaRobbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, November 2018
Penulis

NURMI SYAHFITRI RITONGA
NPM:1505161207

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1. Batasan Masalah	5
2. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Good Corporation Governance (GCG).....	8
a. Pengertian Good Corporation Governance (GCG).....	8
b. Teori Good Corporation Governance (GCG)	10
c. Prinsip-prinsip Dasar GCG	11
d. Manfaat dan Faktor penunjang Penerapan GCG	15
e. Tahap-tahap penerapan GCG.....	16

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
a. Defenisi UMKM	19
b. Kekuatan dan Tantangan Usaha Mikro dan Kecil	20
c. Laporan Keungan UMKM.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Defenisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis Dan sumber data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Perkembangan UMKM Pada Periode 2009-2013	3
Tabel II.1	PDRB Per-kapita Sumatera Utara	23
Table II.2	Capaian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	27
Tabel II.1	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	27
Tabel III.2	Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi.....	31
Tabel III.3	Variabel, Indikator, Instrumen.....	34
Tabel 4.1	Indikator Prinsip Transparansi	42
Tabel 4.2	Indikator Prinsip Akuntabilitas	45
Tabel 4.3	Indikator Prinsip Pertanggungjawaban.....	47
Tabel 4.4	Indikator Prinsip Indepedensi	50
Tabel 4.5	Indikator Prinsip Kewajaran	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era jaman milenial ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau usaha usaha yang berdiri di Indonesia, khususnya kota medan, dimana usaha-usaha pasti memiliki persaingan yang ketat sekalipun satu jenis usaha, sehingga memiliki tingkat resiko usaha mengalami kebangkrutan dikarenakan kurangnya *inovatif*, serta kreatif, dalam mengantisipasi kebangkrutan perusahaan saat ini sangat di anjurkan untuk menerapkan atau melaksanakan *good corporate governance* (GCG), maka dari itu, GCG sudah semakin marak. Tidak hanya marak, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi yang penting dan seringkali dijadikan tolak ukur citra perusahaan.

GCG merupakan salah satu kiat menuju sukses bagi perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan dalam persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Secara lebih luas perselisihan antara kepentingan di suatu organisasi itu terjadi antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat menjadi bahan kritikan.

Pada awalnya *corporate governance* hanya berlaku di Inggris dan Amerika, tetapi seiring berkembangnya kerumitan bisnis di berbagai Negara di dunia maka segera berkembang pula di Negara-negara lain. khususnya indonesia. Dan sekarang ini *corporate governance* sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan *corporate governance* yang baik. Bagi Indonesia, perkembangan mengenai peraturan corporate governance bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yang mengatur tentang peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris *independent* dan membentuk komite audit. pada tahun 1998 itulah, *corporate governance* (CG) mulai di kenalkan pada seluruh Indonesia.

Di Indonesia sendiri isu dan praktek GCG telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). CGPI *awards* misalnya merupakan salah satu kegiatan tahunan yang di ikuti berbagai perusahaan ternama di Indonesia baik swasta maupun perusahaan Negara yang bertujuan memberikan penilaian dan penghargaan terhadap praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara telah di buat beberapa peraturan yang berada di bawah koordinasi kementerian BUMN.

Menurut Dwiridotjahjono (2009) *Good Corporation Governance* bukanlah satu opsi melainkan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan publik di indonesia, karena penerapan *Good Corporation Governance* di semua perusahaan publik akan bermanfaat bagi negara dalam menurunkan tingkat *country risk* dalam upaya pemulihan perekonomian nasional.

Pemerintah melakukan upaya dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintah baru sadar setelah terjadinya krisis, bahwa kebijakan pemerintah selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh, sehingga ke depan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena permasalahan semakin berat. Sejak krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat di pandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Jaswadi, (2017, hal. 162) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Merupakan suatu yang sangat di butuhkan dalam dalam perekonomian indonesia, 99, 99% total unit usaha yaitu lebih dominan UMKM, dan membuka lapangan pekerjaan sejumlah 97, 24% dari seluruh angkatan kerja.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi faktor pendukung peningkatan berbagai macam usaha kategori, mikro, kecil dan menengah, khususnya di indonesia maka Badan Pusat statistik menilai perkembangan Usaha, Mikro Kecil dan menengah selalu bertambah dan baik pertumbuhannya.

Tabel 1. 1
Perkembangan UMKM pada Periode 2009-2013

No	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	52 764 603	53 823 732	55 206 444	56 534 592	57 895 721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,64	2, 01	2, 57	2, 41	2, 41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96 211 332	99 401 775	101 722 458	107 657 509	114 144 082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	persen	2, 33	3, 32	2, 33	5, 83	6, 03
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 212 599, 30	1 282 571, 80	1 369 326, 00	1 451 460, 20	1 536 918, 80
6	Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM	Persen	4, 02	5, 77	6, 76	6, 00	5, 89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162 254, 52	175 894, 89	187 44, 82	166 626, 50	182 112, 70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	-8, 85	8, 41	6, 56	-11, 10	9, 29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Perusahaan UMKM di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat, dari tahun 2009 sampai 2013 jumlah UMKM perunit selalu bertambah, pada tahun 2011 lebih terlihat perkembangannya sampai 55 206 444 Unit atau 2,57% dari tahun sebelumnya yaitu 2010 dan dari tahun sesudahnya 2012 sampai 2013. Efek semakin banyaknya Jumlah UMKM memiliki dampak baik bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, karena UMKM sangat menampung atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua orang, dari data Badan Pusat Statistik menghitung pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun 2009 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah tenaga UMKM mencapai sampai 107 657 509 jiwa atau sama dengan 5,83 % sedangkan pada tahun 2011 Jumlah Tenaga Kerja UMKM sebanyak 101 722 458 jiwa apabila di persenkan yaitu 2,33 sedangkan di tahun 2013 Jumlah Tenaga Kerja UMKM sebanyak 114 144 082 jiwa dan dalam persen sebesar 6,03, jadi kesimpulan dari data tersebut dapat kita simpulkan dari tahun ketahun Jumlah Tenaga kerja yang dapat ditampung dan di perkerjakan semakin meningkat, terlebih pada tahun 2012 peningkatannya sangat bertambah pesat. Dari sini dapat kita telaah semakin UMKM berkembang banyak semakin berkurangnya jumlah tingkat pengangguran.

Maka dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih jauh UKM Sentra ini dapat di katakan baik atau tidak dalam menerapkan *Good Corporation Governaince* agar keuntungan dan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE**

GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi kasus pada Sentra UKM)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah krisis ekonomi yang telah di kemukakan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM (kasus Sentra UKM)

1. Buruknya tata kelola perusahaan dapat menyebabkan berbagai resiko yang akan di hadapi kedepannya salah satunya yaitu kegagalan korporasi yang berdampak pada memburuknya perekonomian di negara.
2. Tata kelola yang di lakukan UMKM cenderung tidak teratur, sehingga kurang memiliki kreatifitas melainkan tidak *inovatif*
3. Adanya perbedaan kepentingan antara direksi dan dewan komisaris dengan pemegang saham dan *stakeholders* memungkinkan terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaporan keuangan
4. Laporan keuangan yang sangat tertutup sehingga para investor tidak tertarik dan berani mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya kepada UMKM
5. Belum menerapkan prinsip GCG menyebabkan datangnya resiko dan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga kerja dan kemampuan yang dimiliki peneliti, serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka peneliti perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang di teliti adalah menggunakan

Penerapan GCG dalam prinsip-prinsip GCG pada perusahaan UMKM. penelitian ini akan menganalisis kondisi internal dari UMKM yang menjadi mitra binaan dan bagaimana praktik operasional usaha jika di kaitkan dengan pelaksanaan asas GCG. Asas GCG yang di gunakan dalam penelitian ini adalah asas GCG yang tercantum dalam Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia yang di keluarkan oleh KNKG, yaitu transparansi (*transparency*) ialah keterbukaan setiap informasi tentang perusahaan tidak ada yang dirahasiakan baik itu kinerja perusahaan atau masalah yang di hadapi perusahaan, akuntabilitas (*accountability*) ialah pengelolaan perusahaan misalnya pengelolaan keuangan harus dapat di pertanggung jawabkan, tanggung jawab (*responsibility*) ialah sebuah kerjasama antar pekerja yang di akui oleh Badan Hukum yang berlaku, independensi (*independency*) ialah perusahaan yang dikelola tanpa ada konflik atau pengaruh serta tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) ialah penyajian informasi secara wajar tidak di lebih-lebihkan atau di kurang-kurangkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini di harapkan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tingkat penerapan *good corporate governance* pada UKM Mart?
2. Apakah prinsip-prinsip GCG secara keseluruhan telah di terapkan dengan baik pada UKM Mart?
3. Apa Dampak setelah atau sebelum dilakukannya *good corporate governance* pada UKM Mart?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan melihat penerapan implementasi *good corporate governance* sebagai salah satu kegiatan perusahaan dalam mencapai Visi dan Misinya dan dalam usahanya memenuhi harapan *stakeholders* serta memberikan beberapa gambaran tentang penerapan *good corporate governance* (GCG) pada UKM Mart.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat membangun khususnya mengenai teori implementasi prinsip dan praktik terbaik (*best practises*) *good corporate governance* yang di harapkan dapat memberikan tambahan keyakinan untuk mengembangkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna bagi UMKM subjek penelitian ini di perbuat untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan pengelolaan perusahaan, supaya penerapan *Good corporation governance* bisa di laksanakan oleh UMKM itu sendiri. Sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip GCG pada UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teori

1. *Good Corporate Governace* (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governace* (GCG)

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporation Governance* (GCG) ada yang menyebutkan tata pamong. corporate governance dapat di definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai – nilai etika.

Menurut Sutedi (2011, hal. 1) “*Good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”. Adapun *center for European policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang di bentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dEfenalam maupun diluar manajemen perusahaan. Seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinikasikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada Hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang di landasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Istilah “*corporate governance*” (tata kelola perusahaan) berasal dari suatu analogy antara pemerintahan suatu Negara atau kota dengan pemerintah dalam suatu perusahaan . Pengertian corporate governance menurut Effendi (2009, hal. 1) adalah sebagai berikut.

Corporate governance is a company's system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment")

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* di definisikan sebagai suatu sistem yang mengendalikan internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Bank Dunia (*World Bank*) Effendi (2009, hal. 1) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang bersangkutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara menyeluruh.

Berdasarkan pengertian di atas GCG merupakan adanya Hukum yang mengatur tentang kinerja perusahaan yang wajib di jalankan baik untuk pekerja, Pemilik perusahaan, bahkan masyarakat tanpa terkecuali.

Lembaga corporate governance di Malaysia, yaitu *finance committee on corporate governance* (FCCG), mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang di gunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat di artikan sebagai seperangkat sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini di sebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih dan baik, Transparan, dan Profesional (BTP) Implementasi prinsip-prinsip GCG domestik maupun asing. Hal ini sangat

penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi.

Menurut Tjager (2003, hal. 25) *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai “seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Dapat kita simpulkan bahwa *corporate governace* pada intinya adalah merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

b. Teori *good corporate governance*

Membawa perusahaan menjadi yang lebih baik dan lebih terarah adalah tugas dari setiap elemen perusahaan. Tentunya, setiap perusahaan memiliki tujuan, untuk selalu menjadi lebih baik. Adanya keinginan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik.

Menurut Sutedi (2011, hal. 13) Munculnya konsep GOOD CORPORATE GOVERNANCE, yaitu jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori agensi, yaitu: pengelola perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, pemberi pinjaman, remunerasi, deviden, berjalannya pasar modal, berjalannya pasar tenaga kerja manajerial, dan *market for corporate control*, melainkan bertambah dengan : informasi, transparansi, accountability, keterbukaan dan kerahasiaan.

1. *Agency theory*
2. *shareholder value theory*
3. *Stakeholder theory*,

dengan penjelasan sebagai berikut;

a. Agency theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak di pisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

b. Shareholder Value Theory

Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai value dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai (value) yang di dapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai value pemegang sahamnya.

c. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder*, dalam pengertian yang umum menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori shareholder value, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja.

c. Prinsip-prinsip Dasar GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Governance merupakan proses yang di pengaruhi oleh top *management* dalam menyampaikan pengarahan, dan pengawasan terhadap pihak manajemen

untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam konteks ini tumbuhnya kesadaran akan arti penting corporate governance ini, *Organization for Economic Corporate and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dapat di terapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing Negara.

Menurut Tjager (2003, hal. 50-53) Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu

- a. *transparency*,
- b. *accountability*,
- c. *responsibility*,
- d. *independency*, dan
- e. *Fairness*

Penjelasan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu;

- a. *Fairnes* (kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham minoritas dan pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini di wujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan- kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan ; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar / pengungkapan penuh material apapun ; mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

b. *Transparency* (transparansi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakrholders)

Prinsip ini di wujudkan antara lain dengan mengembangkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan informasi teknologi (IT) dan *Management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat di kelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini di wujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi

“ *risk-based*” Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*) ; penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi) ; menggunakan *external Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

c. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus di akui sebagaimana di tetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini di wujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi professional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Menurut Effendi (2009, hal. 5) ada tambahan mengenai prinsip GCG yaitu;

d. Kemandirian (*independence*)

Suatu keadaan dimana perusahaan di kelola secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. pengungkapan (*disclosure*)

penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.

f. Sustainability

Menurut Sutedi (2011, hal. 12) mengatakan ketika perusahaan negara (*corporate*) exist dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik, Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama *stakeholder*-nya.

d. Manfaat dan Faktor Penunjang Penerapan *good corporate governance* (GCG)

Penerapan GCG Penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil survei IICG berupa *corporate governance Perception Index* (CGPI) untuk mengukur corporate governance. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian penerapan corporate governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penerapan *good governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan mendatangkan banyak manfaat keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga

pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Menurut Dwiriditjahjono (2009) Berbagai manfaat dan keuntungan yang di peroleh dengan penerapan *good corporate governance* dapat di sebut antara lain;

1. dengan penerapan *good corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus di tanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
3. karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan di tempatkan sebagai salah satu *stakeholders*, yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan.

e. Tahap -Tahap Penerapan GCG

Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transfarancy*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*) di dalam perusahaan, seharusnya di jadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan kegiatan usahanya. perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat

sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang di jalankannya dalam menghadapi persaingan usaha.

Menurut Effendi (2009, hal. 99) mengemukakan “Dengan menerapkan GCG, sebuah perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapai *win-win solution*. artinya, dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan *win-loss*, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan.”

Pada umumnya perusahaan – perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Implementasi
3. Tahap evaluasi

Penjelasan mengenai tahap-tahap penerapan GCG

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama ; 1) *Awareness building*, 2) *GCG diagnostic assessment*. 3) *GCG manual building*.

- a. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.
- b. *GCG diagnostic assessment* atau tahap pemetaan merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah – langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan

yang kondusif bagi penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apasaja yang dapat di ambil untuk mewujudkannya.

- c. GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assesment di lakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti berikut ini.

- 1) Kebijakan GCG Perusahaan
- 2) Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) *Audit committee charter*
- 5) Kebijakan *disclosure* dan transparansi
- 6) Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- 7) *Roadmap* implementasi

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama sebagai berikut.

- a. Sosialisasi, di perlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG
- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah di susun.

- c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi, internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada.

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Definisi UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa di kenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200. 000. 000, 00 (belum termasuk tanah dan bangunan

Menurut irfan dkk (2017, hal. 4) UMKM adalah “ sebuah perusahaan yang tergolong sebagai UMKM yaitu perusahaan kecil yang dimiliki dan diatur oleh satu orang atau dimiliki satu kelompok kecil orang dengan kekayaan dan pendapatan minimum.

Menurut Nayla (2014) mengemukakan *Entrepreneurship* adalah “tindakan kreatif yang membangun suatu value dari suatu yang tidak ada”. *entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang telah di perhitungkan. Menurut Nitisusastro (2010, hal. 26) mengatakan “wirausaha didefinisikan dengan seorang yang

mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba”. Dalam pengertian ini terdapat kata ‘mengorganisasikan’, ‘mengoperasikan’, dan ‘memperhitungkan resiko’, Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha kecil telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha ‘mengoperasikan’ sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba.

Menurut Neode (2009) “Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara .” Terbukti dimasa krisis dengan bertumbuhnya banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi ekspor justru meraup keuntungan yang luar biasa.”

Menurut Lupiyoadi (2007, hal. 44) “Usaha kecil adalah suatu bentuk usaha yang tidak tergantung kepada pemilik dan manajemennya, serta tidak mendominasi pasar dimana ia berada.”

b. Kekuatan dan Tantangan Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai perwujudan konkret ekonomi rakyat yang dirasakan strategis untuk dikembangkan, karena sektor ini mampu menyediakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Menurut Irfan (2017, hal. 7) mengemukakan kekuatan usaha mikro ada 2 yaitu;

1. Keberadaan usaha mikro jelas terbukti mampu mendukung tumbuhnya berwirausaha yang berdampak mengurangi jumlah manusia pengangguran.
2. Mampu memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerah tertentu yang belum dikelola secara maksimal.

Penjelasan dari teori tersebut bahwa Usaha Mikro tidak diragukan lagi manfaatnya, sangat berpengaruh sekali bagi kesejahteraan manusia dengan banyak menampung tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Darwanto (2013) kekuatan UMKM ialah

1. Sumber daya manusia yang kreatif dan mampu mengembangkan inovasi baru.
2. Sebagian besar UMKM masih memiliki hubungan saudara dari jumlah tenaga kerjanya.

Penjelasan dari teori tersebut maknanya ialah Umkm sangat berguna meningkatkan kreatifitas dalam diri pribadi, selalu memiliki ide-ide dan gagasan yang terbaru dan bernilai jual tinggi serta lebih banyak kita jumpai UMKM berjalan dengan yang beranggotakan pimpinan usaha dari keluarga, teman, atau kerabat. Menurut Lupiyoadi (2007, hal. 48) adapun hal yang mendukung keberhasilan suatu bisnis usaha kecil adalah :

1. Biasanya wirausaha-wirausaha kecil adalah tipe orang-orang yang ulet dan pekerja keras, mereka punya tujuan dan dedikasi yang tinggi.
2. Dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa.

Tantangan usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan kekuatan di atas menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia yaitu sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan barang jadi. Menurut Niode, (2009) tantangan yang dihadapi UMKM yaitu

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses UMKM.
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
3. Banyaknya UMKM yang belum *bankable* baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparansi.

Kesimpulannya ialah yang menjadi tantangan dalam UMKM biasanya seperti tidak kecocokan dari dana yang tersedia dan yang didapatkan, Jarang didapatkan sumber dana dari pihak Bank, karena secara prospek UMKM dinilai oleh pihak bank tidak mampu memenuhi syarat perbankan, dikarenakan Manajemen keuangan yang sangat dirahasiakan. Sedangkan menurut Irfan (2017, hal.8) tantangan usaha mikro dan kecil sebagai berikut

- a. Tantangan usaha mikro dan kecil terletak masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan juga kurangnya sumber modal yang dimiliki.
- b. Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang tidak kondusif karena usaha persaingan dan tidak berinovatif sehingga sulit untuk bersaing.
- c. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu sistem pembukuan, dan pengelolaan keuangan, biasanya pengusaha hanya menuliskan barang yang dibeli dan dijual. hal ini akan menyebabkan sulit diketahui berapa penghasilan bersihnya.

Menurut Nurlela (2016) yang menghambat perkembangan UKM adalah manajemen usaha hanya berdasarkan pola pikir UKM, kurangnya pengawasan proses produksi dan kualitas, pencatatan keuangan masih sederhana dan terbatasnya akses pasar. Selain itu pengusaha UKM mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol keuangan yang memadai.

Kesimpulan dari teori ini bahwa yang menghambat perkembangan UMKM tersebut dengan pola pikir yang kurang Pengawasan bagaimana proses Produksi dan kualitas serta pencatatan keuanagn masih sangat sederhana,sehingga sangat sulit untuk mengkontrol keuangan agar berputar dengan baik.

Tabel. II. 1

PDRB per-Kapita Sumatera Utara Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Nilai PDRB ADH Berlaku	521, 954, 95	571, 722, 01	628, 394, 16
PendudukProyeksi (Jiwa)	13, 766, 851, 00	13, 937, 797, 00	14, 102, 911, 00
Kurs USD	11, 869, 65	13, 393, 35	13, 306, 03
Nilai (Juta Rp)	37, 91	41, 02	44, 56
Nilai (US\$)	3, 194, 19	3, 062, 68	3, 348, 69

Sumber dinas koperasi & UKM SUMUT

PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sebesar Rp. 37, 91 Juta, menjadi Rp 44, 56 Juta pada Tahun 2016

c. Laporan Keuangan UMKM

Suatu Neraca dan Laporan laba rugi menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Menurut andreas (2011, hal. 70) mengatakan “ laporan keuangan dapat di artikan untuk menilai kinerja keuangan

perusahaan selama satu periode tertentu. Menurut Sjahrial (2007, hal. 27) Tujuan laporan keuangan “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut nurlela (2016) laporan keuangan adalah “ bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas

- a. Neraca

Merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu buku di tutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau kalender. Menurut Fauji, Muis (2015, hal. 42) Adapun yang terdapat dalam laporan neraca secara umum adalah sebagai berikut :

1. Aktiva
2. Aktiva lancar
3. Aktiva tidak lancar
4. Utang

Penjelasan Laporan Neraca sebagai berikut:

- a. Aktiva

Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan (*differed charges*) atau biaya yang masih harus di alokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (*intangible assets*) misalnya :*goodwill*, hak *patent*, hak menerbitkan dan sebagainya. Pada dasarnya aktiva dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap)

b. Aktiva Lancar

Yaitu : uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau di tukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Pos-pos yang termasuk dalam aktiva lancar adalah : kas, surat-surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, penghasilan yang masih harus diterima, persediaan barang, biaya di bayar di muka.

c. Aktiva Tidak Lancar

Yaitu: aktiva yang mempunyai masa penggunaan yang *relative* panjang dalam arti tidak akan habis dipakai dalam satu siklus operasi perusahaan atau satu tahun dan tidak dapat dengan segera dijadikan kas. Aktiva tidak lancar ada yang berbentuk aktiva berwujud (hak *patent*, hak merek, *goodwill* dan sebagainya).

4.Utang

Utang adalah semua kewajiban perusahaan pada pihak ketiga yang belum dipenuhi. Utang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Pada umumnya utang dibedakan atas dua golongan, yaitu : utang jangka pendek (utang lancar) dan utang jangka panjang.

Menurut Andreas (2011, hal. 9) Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu dan akan berubah mengikuti aktivitas perusahaan setiap harinya. Hal ini dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} = \text{Ekuitas Pemilik}$$

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan Laba Rugi yaitu memperlihatkan semua penghasilan yang diperoleh di kurangi dengan semua beban-beban operasional yang dikeluarkan selama satu periode tertentu.

Menurut Sjahrial (2007, hal. 27) perhitungan Rugi laba sebagai berikut

$$\textit{Income statement} = \textit{profit \& loss statement}$$

c. Laporan Arus Kas

Dalam mengukur arus kas, kita bisa menggunakan penyajian laporan keuangan yang lazim yang biasa disebut sebagai laporan arus kas. Tetapi kita lebih tertarik menggunakan arus kas dari perspektif investor perusahaan, daripada dari tinjauan akuntansi. Tujuan laporan arus kas

menurut Fauzi,muis (2015, hal. 43) ialah untuk melaporkan arus masuk dan arus keluar perusahaan dalam periode berjalan, dibedakan dalam tiga kategori : kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan.

Menurut Sjahrial (2007, hal. 27) perhitungan Laporan Arus Kas sebagai berikut

Arus kas bebas operasi perusahaan = arus kas bebas pembiayaan
perusahaan.

Tabel II. 2
Capaian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Provinsi Sumatera Utara

No	URAIAN	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Koperasi Aktif	%	59, 27	60, 95	58, 06	56, 68	57, 26
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	6, 967	7, 480	6, 825	6, 035	6, 142
3	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	2, 823, 210	2, 855, 399	2, 855, 549	2, 855, 847	2, 857, 124

Sumber dinas koperasi & UKM SUMUT

Dari data diatas dapat di katakan bahwa perkembangan Wirausaha UMKM sebesar 50, 47% di berbagai Kegiatan dan pelatihan bagi UMKM di Sumatera Utara.

Tabel II. 3
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017

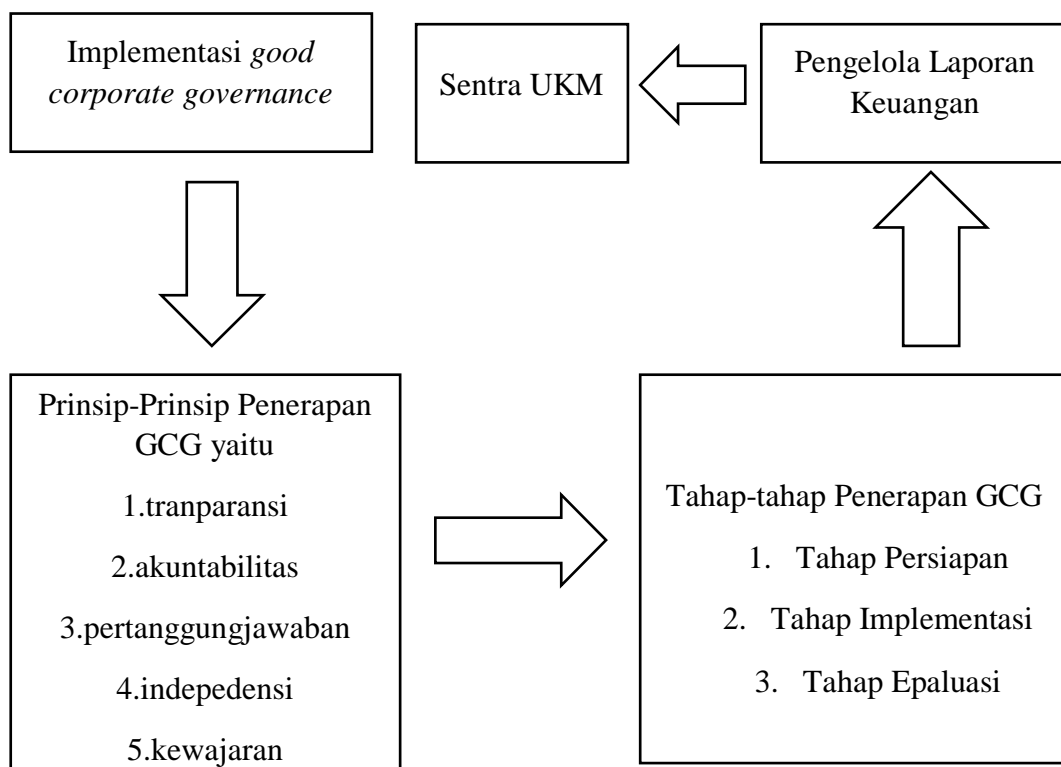
No	Sektor	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	UMKM	2, 823, 210	2, 855, 399	2, 855, 549	2, 855, 847	2, 857, 124

Sumber dinas koperasi & UKM SUMUT

Dari data di atas dapat disimpulkan UMKM semakin naik dari tahun 2013 sampai 2017 terakhir ini, maka dapat dinyatakan bahwa perkembangan UMKM semakin pesat di Sumatera Utara, Unit tidak pernah mengalami penurunan dari tahun ke tahun

B. Kerangka Berpikir

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan kedepan, maka berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Tahap-tahap penerapan GCG, dan bagaimana pengelolaan laporan keuangan pada Sentra UMKM. berdasarkan uraian tersebut maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data yang di perlukan tersedia maka data tersebut di kelompokkan, di uraikan sesuai jenis data dan macam data kemudian di analisis dengan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis serta menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Menurut Sugiyono (2010, hal. 54) penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengukur dan menganalisa Variabel secara sendiri untuk mengetahui secara mendalam tentang variabel yang di teliti.

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan agar mengetahui Penerapan *good corporate governance* pada Sentra UKM

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian GCG yaitu secara sistematis *istilah good corporate governance* sering diartikan sebagai Tata Kelola Perusahaan dengan cara terbaik. GCG ini dapat dilakukan dengan baik apabila nilai etika perusahaan tercapai, tidak korupsi, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangannya, dan jelas manajemen labanya.

Menurut (Healy dan Wahlen, 1999) *Earnings Management* terjadi apabila manajer menggunakan *judgment* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi yang mengubah-ubah laporan keuangan guna menyesatkan para

stakeholders mengenai kinerja ekonomik yang melatar belakangi perusahaan yang menuntut angka-angka yang di minta. Adapun indikator yang diperlukan sebagai berikut

Tabel III. 2
Variabel, Indikator, dan Instrumen

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Tingkat Penerapan <i>good corporate governance</i>	Prinsip; prinsip <i>Good corporate governance</i> 1. <i>Transparancy</i> (transparansi)	a. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang benar, lengkap, tepat dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan.	Ordinal
		b. Keterbukaan dalam proses keputusan kebijakan perusahaan yang di tulis secara proposional dan dikomunikasikan	Ordinal
	2. <i>Accountability</i> (akuntabilitas)	a. Menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing organ perusahaan.	Ordinal
		3. <i>Responsibility</i> (responsibilitas)	a. memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan mencakup lima dimensi yaitu : ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual.

	4. <i>Independency</i> (independensi)	a. Pengembalian keputusan secara profesional dan mandiri yang bebas dari pengaruh pihak lain	Ordinal
		b. Menjalankan aktivitas perusahaan dengan baik dan bebas dari konflik kepentingan.	Ordinal
	5. <i>fairness</i> (kewajaran)	a. Perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara.	Ordinal

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sentra UKM Jl Sei Serayu No. 103, Kota Medan, SUMATERA UTARA

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018 diperkirakan akan selesai April 2019. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut.

Tabel III. 1

Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

No	Kegiatan penelitian	Waktu Penelitian																							
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan judul					■																			
2	Riset Awal						■																		
3	Pembuatan Proposal							■	■	■															
4	Bimbingan proposal								■	■	■														
5	Seminar Proposal										■														
6	Riset											■	■	■											
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■									
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■							
9	Sidang Meja Hijau																	■							

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif yaitu data kualitatif tangkapan atas perkatan subjek penelitian dalam bahasa sendiri dan cerita fakta dari responden yang nantinya akan disusun. Penelitian ini menggunakan sumber data yang di gunakan yaitu;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan di cari peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian yang belum pernah di kumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau periode tertentu. Menurut Sugiyono (2012) data primer adalah data yang di peroleh atau di kimpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengembangkan instrumen penelitian berupa wawancara untuk mengumpulkan data melalui survey, Instrumen penelitian di rancang berdasarkan kajian pustaka dan dikembangkan dari pilar *good corporate governance* pada Sentra UKM. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk *descriptive research*. Manfaat penelitian merupakan *applied research* karena penelitian ini memanfaatkan penerapan ilmu pengetahuan dan isi-isu praktis tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah triangulasi data yang merupakan gabungan dari triangulasi sumber dengan cara melakukan pemeriksaan data yang telah di peroleh melalui beberapa metode penelitian berupa, wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data kualitatif artinya usaha yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah menjadi satu yang dikelola, mencari apa yang penting dan apa yang di perlukan. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adapun tahapann yang dilakukan adalah

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan Data tersebut berupa laporan penerapan GCG pada Perusahaan UMK Sentra.

2. Membaca dan mempelajari data, dan menilai dari gagasan yang ada di dalam data.
3. Menganalisis Penerapan *good corporate governance* pada UKM Sentra.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini di UKM Mart yang ada di Jl sei serayu, dimana UKM mart ternyata memiliki peran penting bagi perekonomian indonesia. Jika membaca peraturan Perundang- undangan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang- Undang ini. Kriteria asset maks Rp 50 juta, Kriteria Omzet maks 300 Juta rupiah.

Menurut Neode (2009) “ Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara,” UKM Mart ini di atur oleh beberapa Peraturan yaitu Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp 600 juta sudah tidak termasuk tanah atau rumah yang di tempati. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah suatu kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 kebawah dan usahanya di miliki warga Negara indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah di bagi kedalam beberapa bagian, yaitu Usaha Rumah tangga mempunyai 1-5 tenaga kerja, Usaha kecil menengah 6-19 tenaga kerja, Usaha menengah 20-29 tenaga kerja dan Usaha besar lebih dari 100 tenaga kerja. Sedangkan UKM Mart adalah kegiatan ekonomi

dengan kriteria Asset 50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omzet 250 milyar. Pemerintah memfasilitasi berdirinya ritel-ritel modern berbasis koperasi, untuk mengangkat derajat UKM serta mendukung pemasaran komoditas lokal. Ada potensi besar untuk berkembang. Tetapi masih butuh pembuktian untuk bertahan dalam jangka panjang. Meskipun sering disebut bahwa perekonomian indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, nyatanya pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di negeri ini terkesan cuma menjadi anak tiri sektor ini selalu berada di pinggiran. Koperasi dan UKM tidak pernah menjadi pemain utama dalam perekonomian indonesia. Ritel tradisional yang hampir seluruhnya dimotori pelaaku koperasi dan UKM lebih di posisikan sebagai obyek penderita dari kehadiran ritel modem. Daya saing ritel tradisional yang rendah semakin tergilas oleh peritel modern masa kini yang dibekali dengan modal besar dan cara kerja efesien. Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk membina mereka, namun belum menunjukkan hasil berarti, itulah sebabnya tujuh tahun terakhir ini, pemerintah mencoba membuat gebrakan baru dengan meluncurkan UKM Mart. UKM Mart adalah toko ritel modern berbasis koperasi. UKM Mart ini dijadikan semacam perangsang bagi gerakan koperasi untuk lebuuh mampu menata kemampuan manajemennya. Kementrian Koperasi dan UKM Mart pada 2013 memproyeksikan jumlah gerai UKM Mart mendekati 260 unit di seluruh indonesia, dan sebagian besar penyebarannya ada di medan.

UKM Mart sebelumnya dikenal sebagai warung serba ada (Warseda) yang dikelola koperasi bersama anggotanya, kemenkop lalu meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelolaannya, dengan menaikkan statusnya menjadi toko ritel

modrn. Fasilitasi yang diberikan antara lain penguatan kelembagaan, bersamaan dengan penataan sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan. Sebagai bentuk pengembangan Waserda, Standar luas gerai memiliki aturan tertentu, minimal 6x12 meter. Struktur bangunan toko juga harus tahan sampai 5 tahun. Singkatnya waserda difasilitasi dengan dana bantuan menjadi minimarket modern berskala UKM. Keberadaan UKM Mart berpotensi membangun jaringan bisnis antargerai UKM Mart dan UKM dengan pemasok. Peningkatan kapasitas usaha Waserda menjadi UKM Mart dengan tagline koperasi kita, merupakan respons sekaligus sebagai upaya sistematis, untuk menghadapi dan menanggapi fenomena permasalahan bisnis ritel di indonesia yang terus berkembang. Program Ini dicangkok dari toko-toko ritel modern yang telah eksis di indonesia, tetapi model yang di kembangkan lebih menonjolkan pemberdayaan Kepada lembaga koperasi. UKM Mart membuka diri secara luas terhadap pasokan komoditas lokal dari itu koperasi dan UKM. Meski demikian, UKM Mart itu tetap diminta mengikuti pola kemandirian, tanpa melupakan aspek profesionalisme dan identitas khas toko ritel koperasi. Pada setiap pendirian UKM Mart, Kemenkop memberikan bantuan stimulasi antara Rp 51 juta sampai Rp 65 juta kepada setiap pengelola UKM Mart. Dana tersebut di alokasikan untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana usaha. Perbaikan yang di maksud mencakup desain toko agar menyerupai toko ritel modern, yang dilengkapi pendingin ruangan. Juga, pengadaan produk dalam wadah rak, dan dukungan teknologi informasi untuk memperlancar transaksi. Sedangkan pelatihan manajemen yang diberikan kepada pengelola diharapkan bisa memberikan layanan standar toko modern. Sistem pelayanan ritel modern berbasis koperasi diharapkan bisa bersaing dengan toko modern yang lebih dulu

eksis. Penampilan toko UKM Mart juga dipulas agar lebih menarik. Sisi keamanan produk juga dijaga, seperti keharusan melengkapi produk dengan keterangan tanggal kadaluarsa. Namun usaha UKM memperluas pasar dengan cara ini sulit dilakukan. Baru sedikit UKM yang berhasil menjadi pemasok untuk kebutuhan ritel modern. Menurut Sri Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, jumlah UKM yang di fasilitasi Kemendag ada 4,725 pelaku. Dari angka itu sampai Mei 2013, baru 18 persen atau 850 UKM yang berhasil jadi pemasok ke ritel modern. Dari jumlah itu, sektor UKM pangan adalah yang dominan.

Banyak UKM tak bisa menjadi pemasok ke ritel modern karena berbagai alasan. Salah satunya adalah syarat yang ditetapkan oleh pihak ritelnya. Misalnya, kemampuan produksi UKM pemasok tidak mampu memenuhi order dari ritel modern, yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo). Sebab, UKM tidak memiliki modal usaha untuk memenuhi order dalam kapasitas besar. UKM bisa memproduksi, namun ketika ritel modern meminta pasokan lebih, ternyata tidak bisa dilayani hanya karena kurang pemodal.

Pendirian UKM Mart bisa dibilang merupakan modifikasi dari program lama yang dibilang gagal mengangkat derajat UKM. Warisan program lama itu adalah jaringan Smesco Mart berbasis koperasi. Smesco Mart adalah program toko ritel koperasi dan UKM yang berkerjasama dengan peritel modern, seperti PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Jaringan minumarket Smesco Mart berbasis koperasi hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 93 gerai. Di bandingkan Smesco Mart, ada beberapa keuntungan dari pendirian UKM Mart, terutama bagi produsen berbagai komoditas lokal. Kebijakan yang ditetapkan

Kemenkop adalah seluruh produk koperasi dan UKM bisa di pasarkan melalui UKM Mart. Persyaratan Standar terhadap komoditas yang dipasarkan memang ada, tetapi disesuaikan oleh koperasi pengelola UKM Mart, yang jelas, persyaratan tidak sesulit ketika produk UKM hendak di pasarkan melalui pasar modern.

Jaringan usaha UKM Mart yang akan di kembangkan juga berdasarkan potensi produk lokal. Artinya, seluruh produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun Koperasi bisa dipasarkan melalui jaringan warung modern itu. Ini bisa menjadi jaminan pasokan komoditas yang dijual.

B. PEMBAHASAN

Dengan menggunakan analisis implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan untuk memahami dan melihat penerapan GCG guna mencapai visi dan misi perusahaan, peneliti menganalisis *Good Corporate Governance* (GCG).

1. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Di UKM Mart

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasilwawan cara, observasi, dan Dokumentasi. Maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan analisa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. Perusahaan yang baik akan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah di tetapkan oleh pemerintah, UKM Mart sesungguhnya belum sempurna untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, walaupun semua

perusahaan memiliki tujuan yang baik dengan cara melakukan metode ataupun strategi untuk pencapaian tujuan Perusahaan itu sendiri, Semua pihak dapat berbeda-beda mendefinisikan makna *Good Corporate Governance* (GCG), bagi UKM Mart *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu

“Itu peraturan Bank Indonesia (PBI) yang di keluarkan pada 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah “*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) karena UKM Mart ini di biayai oleh Bank Sumut maka jelas *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting bagi perusahaan kami ” (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu mekanisme tatakelola organisasi secara baik dalam melakukan peneglolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akantabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur Organisasi *Good Corporate Governance* di garis besari terdiri dari antara lain :

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite- Komite di bawah Dewan Komisaris
5. Satuan Kerja Kepatuhan
6. Satuan Kerja Audit Intern
7. Audit Ekstern
8. Satuan Kerja Manajemen Resiko

9. Stakeholders

Berdasarkan Hal berikut, secara Umum struktur organisasi GCG pada perusahaan dapat di gambarkan dalam struktur sebagai berikut

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang di tentukan dalam Undang- undang. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggungjawab atas kinerja mereka terhadap Pemegang saham.

b. Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di indonesia. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan paling kurang 50 % dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.

c. Direksi

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Penilaian Independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keuangan, seta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Tata kelola organisasi secara baik akan dilihat dalam konteks mekanisme internal organisai atau pun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme interna organisasi lebih fokus kepada bagai mana pimpina suatu organisasi mengatur

jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu di atas sudah menjelaskan seberapa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) untuk diterapkan di dalam perusahaan UKM Mart agar menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi Global. Serta untuk menghindari *fraud* dan KKN dan digunakan agar mendorong tercapainya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada

2. prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu

a. Transparansi (transparency)

Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang benar, lengkap, tepat dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan. Dan keterbukaan dalam proses keputusan kebijakan perusahaan yang ditulis secara profesional dan dikomunikasikan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Table 4.1
Indikator Prinsip Transparansi (Trasparency)

Indikator Transparansi (Transparency)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Menyampaikan Informasi yang benar, lengkap, tepat dan mudah diakses.	ü	
Terbuka dalam pengambilan keputusan kebijakan secara profesional.	ü	

Prinsip transparansi dalam UKM Mart harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun prinsip transparansi yang ada di UKM Mart belum sepenuhnya sesuai, terdapat beberapa faktor yang membuat penerapan tarparansi belum baik yaitu seperti pada *website* yang ada di UKM Mart hanya sebagian orang yang bisa mengaksesnya di karenakan *Website* UKM Mart di pegang oleh stakeholder internal, Hal ini menyebabkan khalayak orang yang kurang mempercayai UKM Mart, padahal, kredibilitas informasi sangatlah penting agar dapat dipercaya oleh semua pengguna informasi.

Hasil wawancara dengan Pengelola di UKM Mart , bahwa “pelaksana pada prinsip transparansi (*transparency*) menurut beliau masih belum terlalu baik karena UKM Mart belum di awasi sepenuhnya oleh pemerintah, maka dari itu prinsip keterbukaan ini masih dilakukan di dalam perusahaan saja tetapi prinsip transparansi di dalam perusahaan dapat dikatakan bagus, karena di dalam perusahaan masih ada berkaitan dari kekeluargaan, maka bagi kami kerahasiaan sangat kecil sekali terjadi. (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Oleh sebab itu banyak Pemasok- pemasok barang yang meletakkan barang atau produk makanannya atau produk lokalnya kepada UKM Mart yang sistem penjualan dan labanya dan serta sistem penjualannya telah di sepakati oleh pihak yang bersangkutan dan telah menerima kesepakatan kerjasama. Dan keterbukaan yang dapat di ambil mengenai promosi jabatan bagaimana prinsip transparansi yang di lakukan oleh perusahaan, Prinsip itu dilakukan dengan cara seperti yang di dapat oleh jawaban dari wawancara yang peneliti lakukan

Transparansi itulah dengan di adakannya aturan yang jelas seperti promosi jabatan sudah dijelaskan aturan dan ketentuannya, bagaimana pengenaan biaya-biaya misalnya dalam biaya administrasinya itu sudah jelas, dan apabila di internalnya sendiri itulah sebagaimana promosi pegawai, pengenaan sanksi dan kenapa di kenakan sanksi itulah bentuk transparansinya. (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan UKM Mart dapat di simpulkan bahwa dengan di terapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di UKM Mart dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah di terapkan dengan sangat baik, dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan sangat jelas, serta tepat dan mudah diakses contohnya dalam keterbukaan informasi pendanaan maupun lainnya.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan untuk itu perusahaan wajib dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya. Di dalam UKM Mart dalam penerapan prinsip akuntabilitas sesuai dengan *job*

discription nya masing-masing, seperti yang di ungkapkan Pengelola UKM Mart ibu Ria Homma dalam wawancara yang penulis lakukan

“kita bekerja disini sesuai dengan pekerjaan masing- masing setiap karyawan memiliki keahlian khusus di bidangnya. Tapi ya jika karyawan lain minta bantuan yang mau dikerjakan kalau kita lagi kosong ya di bantu misalnya meminta bantuan ngitung- ngitung ya di bantu ”

Begitu juga yang dikatakan oleh salah satu karyawan UKM Mart yang berkerja khusus di bagian pemotretan produk serta tentang membuat desain untuk mengadakan undangan atau iklan suatu produk yang di keluarkan oleh UKM Mart begini penjelasan

“saya disini sebagai desainer, saya kurang tahu bagaimana proses pekerjaan karyawan lainnya saya Cuma tahu kak Lina itu sebagai kasir, saya tidak pernah menggantikan profesi para karyawan disini yang jelas apa yang saya kerjakan saya akan mempertanggungjawab kan hasil pekerjaan saya ini, tapi untuk menanyakan lebih jelas tanyakan saja kepada kak Ria Homma selaku pengelola Ukm Mart disini(wawancara dengan abang Agung salah satu karyawan UKM Mat)

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, akan tetapi lebih mengkedepankan esensi hidup manusia yaitu berupa pentingnya pertanggung jawaban kepada Seluruh pekerjaan yang telah di kerjakan dan mau di kerjakan. Apabila teori menurut Tjager dikaitkan dengan hasil wawancara ini yang di peroleh peneliti dari lapangan wujud nyata Akuntabilitas yang di lakukan UKM Mart baik sistem, fungsi, dan pertanggungjawaban organ perusahaan telah berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, peneliti menilai bahwa prinsip akuntabilitas pada UKM Mart menunjukkan bahwa terdapat indikator sebagai berikut

Tabel 4.2

Indikator Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Indikator Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Menetapkan rincian tugas		ü
Tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan	ü	

Dalam prinsip akuntabilitas UKM Mart harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam menetapkan rincian tugasnya, UKM Mart harus dikelola dengan cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan UKM Mart dengan tetap memperhitungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Penerapan Prinsip akuntabilitas juga belum bisa di katakan baik sepenuhnya. Hal ini di sebabkan oleh pekerjaan yang terperinci belum dilakukan karena karyawan lain jika ada waktu luang bisa saling membantu karyawan yang lain, ini di khawatirkan muncul adanya rangkapan jabatan. Selain itu UKM mart masih dalam proses penyempurnaan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) perusahaan adalah memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan mencakup lima dimensi yaitu : ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual. UKM Mart pun disini di harapkan memperhatikan segala kesesuaiannya dalam melakukan operasionalnya sesuai

dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga Pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan khususnya pemasok produk, dan UKM Mart juga harus bermoral dalam melakukan perniagaan dalam perusahaan harus mengikuti hukum yang berlaku dan etika berjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila teori Tjager di terapkan pada hasil wawancara ini maka Prinsip Responsibility yang dilakukan oleh UKM Mart sudah taat dalam peraturan perundang-undangan, UKM mart pun peduli dengan masyarakat sekitar karena UKM Mart sudah banyak melakukan Sosialisasi terhadap IKM lainnya dan bagus terhadap Pelayanannya karena banyak Pemasok yang mempercayai pada UKM Mart dan ingin mengikuti Sosialisasi yang diadakan Pada UKM Mart seperti Gambar di bawah ini



Pertanggung jawaban yang di lakukan UKM Mart sangat patut di apresiasi karena karyawan mengerti dia itu apa kerjanya, apa yang harus dilakukannya seperti sudah mendarah daging pekerjaannya didalam dirinya sendiri, karena kami bukan sembarang menerima orang untuk bergabung di perusahaan kami seperti yang di sampaikan dari wawancara berikut,

Kami sangat tidak diinginkan untuk buang badan untuk mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan semua tanggung jawab dari karyawan, atas pekerjaan yang dilakukannya, dia harus bertanggungjawab tentang beban apa yang di emban untuk dia, sampai saya sendiri tahu siapa jadi ini siapa jadi itu (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip pertanggungjawaban pada UKM Mart menunjukkan bahwa telah dilakukan dengan baik sebagai berikut

Tabel 4.3

Indikator Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan perusahaan	ü	
Ekonomi	ü	
Hukum	ü	
Moral	ü	
Sosial	ü	
Spiritual		ü

Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) pada UKM Mart sudah sangat dilakukan dengan baik Seperti mengikuti aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, peduli terhadap sosial, memberikan Spiritual yang bagus , contohnya memberi Semangat pada mahasiswa atau generasi milenial yang hadir untuk mengunjungi UKM Mart agar mau menjadi pengusaha yang hebat, seperti pada gambar ini



Sebagai perusahaan Kecil Menengah Kegiatan operasi yang terintegrasi bertujuan menciptakan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Pencapaian nilai dan hasil ekonomi perusahaan yang baik menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab perusahaan yang semakin berpola. Bentuk tanggung jawab perusahaan di bidang ekonomi di tunjukan dengan berkontribusi secara aktif seperti menyediakan tempat untuk penyaluran barang sampai keluar kota ataupun negara

Apabila teori menurut Tjager di kaitkan dengan hasil wawancara yang di peroleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Responsibility yang dilakukan oleh UKM Mart menurut persentase hasil jawabannya menyatakan bahwa UKM Mart

sudah taat pada peraturan perundang-undangan, dan UKM Mart peduli terhadap masyarakat di sekitarnya.

d. *Independency (Independency)*

Independency (Independency) adalah pengambilan keputusan secara profesional dan mandiri yang bebas dari pengaruh dari pihak lain serta menjalankan aktivitas perusahaan dengan baik dan bebas dari konflik kepentingan. Untuk memungkinkan di laksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus di kelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain. Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang di antara karakternya sesuai dengan Visi misi perusahaannya seperti yang di ungkapkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut pemaparannya

“ Setiap perusahaan semuanya memiliki visi misi masing-masing, jadi tidak mungkin di di ikut campuri oleh tangan orang lain, sehingga pembagian hasil atau laba dari penjualan akan tetap sama dengan porsinya sendiri, seperti pemegang saham dan yang lainnya kayak pemasok akan tetap pada pendapatannya saat berhasil” (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Maka dapat disimpulkan Independensi pada UKM Mart mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan atau suatu tindakan dan perbuatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menilai bahwa prinsip Independensi UKM Mart telah di laksanakan dengan baik sebagai berikut

Tabel 4.4
Indikator Prinsip Independensi (*indepency*)

Indikator Independensi (<i>indepency</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Pengambilan keputusan secara Profesional, mandiri yang bebas dari pihak manapun	ü	
Menjalankan aktivitas perusahaan dengan baik dan bebas dari konflik kepentingan.	ü	

Pada UKM Mart prinsip independensi sudah di terapkan dengan baik, seperti pengambilan keputusan untuk rapat yang Profesional bebas dari pihak manapun dan baik dalam menjalankan aktivitas perusahaan bebas dari masalah- masalah kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Mart selalu profesioanl dalam mengambil keputusan, Maka Prinsip Independensi pada UKM Mart sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan telah bagus.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*Fairness*) merupakan Perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Dalam prinsip kewajaran (*fairness*) pada UKM Mart dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan UKM Mart tidak membedakan antara Ras, suku, agama, ataupun ekonomi kasta yang menyebabkan terjadi perlainan dalam memberikan sikap kepada salah satu pihak, seperti yang di ungkapkan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Pengelola UKM Mart mengungkapkan bahwa

“ Kewajaran yang dilakukan harus adil kepada semua pihak baik, karyawan sesama pemasok, sesama pemegang saham. Contohnya jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran tidak peduli jabatannya atau ikatan terhadap keluarga karena sebagian karyawan di sini masih terdapat ikatan keluarga atau rekan dekat, selama dia melakukan perbuatan yang salah maka akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah berlaku ” (wawancara dengan ibu Ria Homma pengelola UKM Mart)

Maka dapat disimpulkan Prinsip kewajaran (*Fairness*) pada UKM Mart sudah di terapkan karena semua karyawan saling memperlakukan adil dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurigaan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang di lakukan oleh orang dalam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menilai bahwa prinsip kewajaran pada UKM Mart menunjukkan bahwa telah di laksanakan dengan baik sebagai berikut :

Tabel 4.5

Indikator Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Indikator Kewajaran (<i>Fairness</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan setara	ü	

Pada UKM Mart telah adil terhadap karyawan dimana tidak ada yang di beda-bedakan karyawan satu dengan karyawan lainnya, semua karyawan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam pengembangan karir yang sama setiap karyawan.

Menurut KNKG, salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui sistem manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selain itu kegiatan terencana dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik. Di samping itu, perlu dibentuk sistem kerja sama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi *stakeholder*.

Prinsip-prinsip *good Corporate Governance* (GCG) antara lain *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* saat ini wajib dan harus diterapkan disegala aspek bisnis termasuk UKM Mart untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien dan transparan, Dan UKM Mart penerapan prinsip-prinsip GCG masih terdapat beberapa yang harus masih diperbaiki dan ditingkatkan.

3. Dampak setelah dilakukan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Sebelum Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat sebelum Penerapan Karyawan pelaksanaan hanya mendapatkan upah Gaji Pokok lembur, Premi, Tunjangan. Hal ini karena keuntungan

perusahaan belum seluruhnya merata kepada karyawan jadi fasilitas masih terbatas. Pendapatan karyawan UKM Mart dihitung dari jumlah gaji pokok berdasarkan golongan di tambah realisasi kerja.

2. Setelah adanya *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang sering di sebut sebagai tatakeloa perusahaan yang baik di Ukm mart ini membawa begitu manfaat terhadap karyawan seperti Toleransi dan empati karyawan dengan karyawan lainnya saling berikatan dengan baik, Komunikasi berjalan dengan baik, Kerjasama yang baik , dan dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan baik, Memiliki etika dan moral yang tidak melanggar Undang- undangan yang telah teratur.

Dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap peningkatan hasil kinerja karyawan UKM Mart berupa menerapkan fasilitas dan tunjangan yang memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kreatifitas sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga Penilaian keuangan perusahaan juga terdapat semakin baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi GCG pada dalam Pengelolaan Perusahaan UKM Mart maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan oembahasan tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bahwasannya UKM Mart sudah terlaksana, menerapkan transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasioanal lembaga tersebut yaitu prinsip akuntabilitas.
2. Analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada UKM Mart memiliki tingkatan yang sangat baik, dari sebelum menerapkan GCG sampai akhirnya Menerapkan GCG semakin meningkat dari segi pengelolaan keuangannya, kinerja karyawannya, terlaksana dengan baik sekali.
3. Setelah menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* maka dapat di ambil kesimpulan dari dampak sebelum dan sesudah di terapkannya GCG yaitu salah satunya berdampak kepada karyawan yang berkerja seperti Upah gaji pokok lembur, premi tunjangan, di karenakan keuntungan perusahaan keseluruhannya merata dan fasilitasnya masih terbatas. Sedangkan setelah menerapkan GCG UKM Mart semakin baik, seperti toleransi kepada karyawan dengan

karyawan lainnya saling berkerja sama dengan baik, memiliki Etika dan Norma yang tidak melanggar undang- undang yang telah jdi atur.

B. Saran

Setelah menyajikan, menelaah, mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ambil yaitu

1. Pengelola UKM Mart di harapkan senantiasa mengontrol dan memotivasi ppara karyawan dalam membina anggota untuk mmembentuk karakter pegawai sesuai dengan prinsip GCG yang telah dilaksanakan dengan maksimal. Pengelola juga di harapkan sering mengadakan evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance*
2. UKM Mart sudah sangat baik menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan pedoman yang berlaku meskipun Ukm mart bukan perusahaan Go publik tetapi sudah siap untuk melaksanakannya, maka dari itu hendaknya perlu di pertahankan dan di tingkatkan lagi dan dapat ditetapkan dengan maksimal.
3. UKM Mart jauh lebih baik setelah menerapkan *Good Corporate Governance* daripada sebelumnya dapat dilihat dari dampak dari kesimpulan diatas, maka sangat di sarankan untuk UKM Mart tetap terus melaksanakan tata kelola yang baik karena semakin bagus juga

perusahaan dan bisa melaksanakan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas. (2011) *Manajemen Keuangan UKM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darwanto. (2013) Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 20 (2). 143-149
- Dwiridotjahjono, Jojok. (2009) . Penerapan good corporate governance, Manfaat dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5 (2). 103-111.
- Effendi, Arif. (2008). *The Power Of good corporate governance Teori dan Implementasi*. Jakarta : Selemba Empat.
- Prayogi, Andi, Muhammad, Nasution, Irfan, Muhammad, Nasution, Affandi, Mirsyah, Satria. (2017). *Manajemen Usaha Untuk Usaha Mikro & Kecil*. (Cetakan ke-1) . Medan : Umsu press
- Jaswadi. (2016). Analisis Tingkat Implementasi good corporate governance Pada Usaha Kecil dan Menengah”. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20 (2). 161- 179.
- Juliandi, Azuar, Nasution, Irfan, Manurung, Saprial. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU Press
- Lupiyoadi, Rambat. (2007). *Entrepreneurship from mindset to strategy*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Nayla p, Akifa. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Jogjakarta : Laksana.
- Nitisusatro, Mulyadi. (2010). *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung : Alfabeta
- Niode, Idris yanto. (2009). *Sektor UMKM di Indonesia, Profil, Masalah, dan strategi Pemberdayaan*. 2 (1). 157-169
- Sjahrial, Dermawan (2007). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Solihin, Ismail. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Selemba Empat.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sari, Maya (2018). Penerepan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan”. *Prosiding The National Conferences Manajement and Business (NCMAB) 2018*